IV. KERANGKA PEMIKIRAN

4.1. Program Pengelolaan ALK


Selama ini upaya memperbaiki kondisi ALK, melalui program pengembangan teknologi usahatani konservasi (TUK), masih bersifat ad-hoc dan partikularistik. Bisa dikatakan bahwa penanganan ALK secara kelembagaan (formal) masih terpecah-leceh. Sebagai gambaran, yang mendapat mandat untuk menangani konservasi tanah dan sumberdaya alam adalah Departemen Kehutanan; sementara itu Departemen Pertanian (seakan-akan) hanya pelengkap legitimasi suatu program konservasi. Program konservasi tanah, terutama penghijauan, banyak dilaksanakan di lahan petani, dan hal ini sangat dekat dengan kehidupan petani sehari-hari. Departemen Pertanian relatif memiliki kompetensi dibanding Departemen Kehutanan dalam memfasilitasi petani agar dapat melepaskan diri dari ancaman kemiskinan dan kelaparan, dan


Mengambil kesejajaran dengan pemikiran Scott (1989), dalam kondisi "modal manusia" yang masih lemah, terutama dilihat dari pemenuhan kebutuhan subsisten atau basic needs-nya masih terancam, akan sulit jika masyarakat pedesaan dibeberkan tugas menyelamatkan ALK setempat. Kerusakan ALK di bagian hulu DAS di Jawa bukan hasil dari proses yang berlangsung singkat dan partikularistik. Oleh sebab itu, perbaikan pengelolaan ALK secara berkelanjutan hanya mungkin jika mereka terbeka dari tekanan kebutuhan dasar Suatu anggapan yang sangat tidak tepat, terutama dari kalangan perencana pembangunan di pusat, bahwa upaya penyelamatan ALK setempat (termasuk penyelamatan hutan, tanah dan air) bisa sepenuhnya dibeberkan pada masyarakat pedesaan. Pembebanan ini bisa saja dilakukan jika masyarakat pedesaan secara kolektif sudah memiliki kekuatan (modal ekonomi, manusia, prasarana, sosial, budaya dan kemampuan melakukan advokasi politik) yang memadai.

Program konservasi tanah dan ALK di perbukitan hulu DAS, seperti FSR-UACP, selama ini masih terfokus pada obyek fisik dan ekosistem spesifik. Program ini belum diarahkan secara khusus agar perluasannya ke ranah yang lebih luas dan memiliki spill-over effects besar (Fagi, 2003). Selagi aparat atau lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah masih disibukkan (saling) "bertarung" mempertebutkan proyek konservasi tanah secara fisik, maka aspek pemberdayaan masyarakat pedesaan
setempat tidak akan banyak tersentuh. Dalam keadaan masyarakat pedesaan masih berbera lemah atau tidak berdaya (misalnya lemah ekonomi, lemah dukungan prasarana, lemah pengetahuan, lemah keorganisasian dan advokasi politik, dan lemah partisipasi dalam pemerintahan), maka selama itu pula upaya perbaikan pengelolaan konservasi tanah atau ALK akan mengalami ganjalan serius. Hubungan antara masyarakat pedesaan yang tidak berdaya di satu sisi dan semakin rusaknya kondisi tanah dan sumberdaya alam di sisi lain bisa sat ini dikatakan berada dalam "jebakan lingkaran setan kemiskinan (vicious poverty trap)".

Walaupun P2LK bertujuan untuk menyelamatkan tanah, hutan dan air, namun jika tidak dibarengi dengan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan (atau penguatan modal sosial) setempat secara khusus niscaya tujuan P2LK tersebut akan sulit dicapai. Kegiatan PBD memiliki tujuan yang hampir sama dengan P2LK. Hanya saja dalam kegiatan PBD telah dimasukkan beberapa komponen penguatan modal sosial lebih banyak dibanding P2LK. Dilihat dari pemberdayaan masyarakat pedesaan setempat, kegiatan yang dijalankan PBD (DIY) memiliki beberapa kelebihan dibanding P2LK (Jawa Tengah). Dalam PBD antara lain dimasukkan komponen peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan, usaha skala kecil (industri rumah tangga), kredit pedesaan dan kesehatan masyarakat pedesaan secara kelompok (Anonimous, 1979). Secara teoritis dapat dibuat perkiraan bahwa kemungkinan keberhasilan PBD dalam perbaikan pengelolaan ALK lebih besar dibanding P2LK.

Tabel 4 memperlihatkan beberapa persamaan dan perbedaan antara P2LK dan PBD dilihat dari aspek pentahapan dan model pemberdayaan masyarakat pedesaan. Tampak bahwa dilihat dari aspek penguatan modal alam (natural capital), kedua program (P2LK dan PBD) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang berarti. Namun jika dilihat dari pengembangan prasarana fisik (constructed capital) dan penguatan kewirausahaan usaha non pernaian PBD menunjukkan gambaran yang lebih baik dibanding P2LK. Lebih-lebih lagi jika dilihat beberapa komponen untuk mewujudkan modal sosial yang lebih kuat dan masyarakat madani (civil society), seperti ditunjukkan pada keorganisasian petani, pemerintahan desa dan kepemimpinan lokal, kegiatan yang dikembangkan dalam PBD lebih lengkap dibanding P2LK.
<table>
<thead>
<tr>
<th>P2LK (Jawa Tengah)</th>
<th>Tahapan dan Model Pemberdayaan 1)</th>
<th>PBD (DIY)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>+</td>
<td>Prasarana pendukung (fisik)</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>++</td>
<td>Perbaikan sumberdaya alam</td>
<td>+++</td>
</tr>
<tr>
<td>++</td>
<td>- Konservasi tanah</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>++</td>
<td>- Penghutanan kembali</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>++</td>
<td>- Silvipasture</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>Perbaikan basis produksi pertanian subsistensi</td>
<td>+/++</td>
</tr>
<tr>
<td>+++</td>
<td>- Intensifikasi pekarangan</td>
<td>+++</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>Usaha non-pertanian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>- Industri rumah tangga</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>0/+</td>
<td>- Perkreditan pedesaan</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>Kualitas dan keberlanjutan penyuluhan pertanian</td>
<td>++++/+++</td>
</tr>
<tr>
<td>0/+</td>
<td>Keorganisasi petani</td>
<td>+++</td>
</tr>
<tr>
<td>0/+</td>
<td>Kepemimpinan lokal</td>
<td>++/+</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>Pemerintahan desa</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>+</td>
<td>Manajemen dan partisipasi petani</td>
<td>++</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Keterangan: 0=tidak ada; + = lemah; ++ = sedang; dan +++=kuat

4.2. Hubungan antara ALK dan Masyarakat

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian didasarkan pada pengertian bahwa pengelolaan ALK di pedesaan merupakan bagian dari pembangunan pedesaan berkelanjutan. Model penguatan modal sosial atau pemberdayaan masyarakat setempat (lokal) dalam pengelolaan ALK di pedesaan dapat dijelaskan melalui model peningkatan kualitas interaksi antara ALK setempat dengan sistem masyarakatnya, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Tampak bahwa hubungan interaksional antara ALK dan masyarakat pedesaan tidak bisa dipandang sebagai sistem tertutup. Dengan masuknya aliran energi dari luar, seperti: penggunaan bahan kimia (misalnya pupuk anorganik dan obat-obatan buatan pabrik) dan bahan bakar gas atau minyak bumi; informasi, seperti: pola kehidupan modern di perkotaan melalui televiisi dan modal finansial; hubungan interaksional antara ALK dan sistem masyarakat di pedesaan yang semula seakan-akan menggambarkan ciri integratif, stabil dan harmonis secara cepat bisa bergeser ke ciri yang disintegratif, tidak stabil dan disharmoni.


Selama masyarakat setempat belum berhasil diberdayakan, tekanan terhadap ALK di pedesaan semakin hari diperkirakan akan semakin berat. Penyebabnya antara lain, pertama, selama kondisi krisis ekonomi belum terpecahkan dan sektor ekonomi kecil dan menengah di perkotaan masih terpuruk, maka masyarakat akan kembali ke desa dan mengolah lahan sebagai alternatif untuk bertahan hidup. Diperkirakan banyak masyarakat pedesaan (yang beberapa tahun sebelumnya sudah mulai banyak mengadu
masih di perkotaan) kembali ke pertanian di pedesaan. Walaupun (mungkin saja) tidak mengolah lahan, sedikit-kecilnya masyarakat yang kembali ke desa ini akan menjadi tambahan beban bagi kehidupan masyarakat pedesaan yang sudah cukup sulit. Sudah barang tentu hal ini menyebabkan tekanan dan eksploitasi terhadap ALK semakin berat.

Kedua, difusi nilai konsumerisme (perkotaan) dalam kehidupan pedesaan tidak dapat dicegah secara efektif. Difusi nilai tersebut diperkirakan telah berlangsung intensif melalui melanin “kehidupan modern” di media elektronik dan cetak, dan juga melalui (semakin terbukanya) transportasi antar daerah. Terserapnya budaya tinggi hati kehidupan perkotaan pada golongan muda di pedesaan juga semakin sulit dibendung. Kebutuhan uang tunai masyarakat pedesaan untuk mengikuti pola kehidupan konsumerisme dan tinggi hati masyarakat perkotaan, karena harus membeli barang dan jasa dari perkotaan, semakin besar. Hal ini sudah barang tentu akan semakin memaksakan masyarakat pedesaan meningkatkan eksploitasi ALK untuk menghasilkan produk pertanian (tanaman semusim) yang bisa cepat dijual. (Walaupun bunga murah, kemungkinan hal itu tidak akan menghalangi petani menjual hasil hasahataninya).

Ketersediaan lahan kering di kawasan DAS hulu tidak bertambah, dan kualitasnya semakin hari semakin menurun. Sangat mungkin tuntutan kebutuhan masyarakat pedesaan di masa datang akan terus meningkat. Lebih-lebih jika budaya takus (greed) dan semangat untuk hidup hemat sulit ditegakkan, maka hal ini akan memperbesar kesulitan dalam pengelolaan ALK. Masih sulitnya masyarakat pedesaan tawara keluar dari jebakan “peradaban agraris” juga masih menjadi beban besar bagi ALK yang sudah semakin rusak. Karena industrialisasi dan usaha non-pertanian di pedesaan belum berkembang, maka pilihan kegiatan usaha untuk mengurangi tekanan terhadap ALK juga masih sulit dikembangkan.

Gambaran bahwa modal alam berupa ALK yang dahulu melimpah, bisa dinilai sebagai barang bebas dan bisa dimiliki secara bersama, sekarang ini sudah berbeda sama sekali. Permuakaan lahan sudah banyak yang tidak terutup tanaman. Sinar matahari dan siraman air hujan langsung menghantam permukaan tanah tanpa menghalangi. Pengikisan hara atau lapisan olah menjadi sulit dihindari, dan energi matahari selama setengah tahun banyak terbuang. Meningkatnya intensitas kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, juga peristiwa tanah longsor, merupakan gambaran betapa semakin besarnya tingkat kerusakan ALK dewasa ini,
khususnya di Jawa. Kerusakan ALK ini bukan saja menjadi bagian keprihatinan masyarakat hulu DAS, melainkan telah mengibas juga pada masyarakat tengah dan hilir DAS.


Beberapa aspek yang mungkin sekali tidak mudah dianalisis dengan model ekosistem masyarakat tradisional, seperti yang dikenalkan Rachman (1996), antara lain: pertama, peran lembaga dan otoritas pemerintah sangat besar dalam mempengaruhi keseimbangan ALK di pedesaan. Walaupun menurut undang-undang atau secara formal lembaga pemerintah adalah "representasi" masyarakat (Friedrich, 1950), namun ini bukanlah hasil langsung dari proses adaptasi masyarakat pedesaan dalam menanggap perubahan ekosistemnya. Lembaga pemerintah secara otonom bisa membantu pengetahuan baru dan menggunakanannya untuk merubah pola pengelolaan
ALK di pedesaan, yang mungkin sekali pengetahuan tersebut berbeda dengan pengetahuan masyarakat setempat. Menjadi pertanyaan apakah pengetahuan petani tentang ALK di tingkat sub-DAS mampu meliputi sampai tingkat DAS? Selain itu, pemberian bantuan (misalnya) berupa bibit dan input pertanian, pembangunan asraraan fisik pedesaan, dan modal finansial yang digerakkan oleh program pemerintah bisa menjadi faktor perubahan ALK yang sangat besar dan tidak bisa diadaptasi secara cepat oleh masyarakat setempat.

Kedua, anggapan bahwa telah terjadi keseimbangan dalam hubungan antara masyarakat dan ekosistemnya tampaknya sulit diterima begitu saja. Intervensi pemerintah melalui kegiatan P2LK dan PBD menunjukkan bahwa keseimbangan hubungan antara ALK dan masyarakat di pedesaan tidak terjadi. Dengan kata lain, bahwa jika hanya mengandalkan pada dinamika internal antara masyarakat dan ekosistem setempat; kualitas pengelolaan ALK di bagian hulu DAS akan terus merosot. Hubungan pertukaran energi, bahan dan pengetahuan antara kawasan bagian hulu DAS dan hilir DAS juga akan mengarah pada ketidak-seimbangan ("imbalance"). Demikian juga halnya pada hubungan di bidang pertukaran kekuatan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek kemasyarakatan lainnya.

Ketiga, anggapan bahwa tata nilai masyarakat tradisional telah mapan dan mampu mengendalikan masyarakat dalam mengelola ekosistemnya dinilai terlalu diwarnai romantika yang mengidolakan kehidupan masyarakat tradisi sebelumnya. Anggapan ini sedikit banyak mengandung "utopia" dan sulit diterapkan pada masyarakat transisional di pedesaan Jawa. Sangat mungkin perubahan ALK di pedesaan Jawa adalah berawal dari perubahan tata nilai masyarakatnya. Masuknya nilai-nilai baru; sejalan dengan perkembangan teknologi, migrasi dan industrialisasi di perkotaan (Friedrich, 1950); yang merembes ke desa hampir dipastikan tidak bisa dibendung. Nilai-nilai ini telah menggiring pada semakin banyaknya keinginan (bukan kebutuhan, need) yang harus dipenuhi oleh masyarakat pedesaan. Semakin sulitnya masyarakat pedesaan bisa bertahan dan meningkatkan taraf kehidupannya adalah akibat adanya ketidak-seimbangan ("imbalance") hubungan antara masyarakat kota dan desa, industri dan pertanian, berpengetahuan modern dan tradisional, berteknologi padat modal finansial dan padat tenaga kerja, berkekuatan politik besar dan kecil, dan seterusnya.

Keempat, suatu pengetahuan memiliki "kekuatan" dan perlu dibangun untuk mengadakan perubahan ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Membangun
ALK di pedesaan, yang mungkin sekali pengetahuan tersebut berbeda dengan pengetahuan masyarakat setempat. Menjadi pertanyaan apakah pengetahuan petani tentang ALK di tingkat sub-DAS mampu meliputi sampai tingkat DAS? Selain itu, pemberian bantuan (misalnya) berupa bibit dan input pertanian, pembangunan prasarana fisik pedesaan, dan modal finansial yang digerakkan oleh program pemerintah bisa menjadi faktor perubahan ALK yang sangat besar dan tidak bisa diadaptasi secara cepat oleh masyarakat setempat.

Kedua, anggapan bahwa telah terjadi keseimbangan pada hubungan antara masyarakat dan ekosistemnya tampaknya sulit diterima begitu saja. Intervensi pemerintah melalui kegiatan P2LK dan PBD menunjukkan bahwa keseimbangan hubungan antara ALK dan masyarakat di pedesaan tidak terjadi. Dengan kata lain, bahwa jika hanya mengandalkan pada dinamika internal antara masyarakat dan ekosistem setempat; kualitas pengelolaan ALK di bagian hulu DAS akan terus memerosot. Hubungan pertukaran energi, bahan dan pengetahuan antara kawasan bagian hulu DAS dan hilir DAS juga akan mengarah pada ketidak-seimbangan (“imbalance”). Demikian juga halnya pada hubungan di bidang pertukaran kekuatan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek kemasyarakatan lainnya.


Keempat, suatu pengetahuan memiliki “kekuatan” dan perlu dibangun untuk mengadakan perubahan ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Membangun
pengetahuan ALK, dengan demikian, harus didasarkan pada keberpihakkan untuk
menjukkan kehidupan yang lebih baik. Menurut Sandstrom (2002), pengetahuan
bukan sekedar suatu disiplin ilmu melainkan (lebih dari itu) harus mengandung
inggung jawab dan dilandaskan pada komitmen (“moral”) untuk merubah kehidupan
masyarakat pedesaan yang berkelanjutan. Dengan pandangan ini ada dua hal yang
tinggi penting dipahami, yaitu (1) Keadaan yang ada pada masyarakat pedesaan masih jauh
dari memadai dilihat dari pencapaian ke sejahteraan secara berkelanjutan; dan (2)
Pengetahuan yang dibangun haruslah memiliki makna praktikal di lapangan. Butir (2)
Memberikan gambaran bahwa penelitian ekologi manusia memiliki peran penting
untuk melakukan perubahan masyarakat pedesaan ke tingkat yang lebih baik.

Kelima, penelitian ekologi manusia perlu dikaitkan langsung dengan kenyataan
yang berkembang di lapangan. Jika modelnya sejak awal dibuat sudah baku dan statis,
maka pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian akan memiliki peluang terbatas
untuk diimplementasikan sebagai “kekuatan” perubahan masyarakat. Disamping
pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian akan bersifat partikularistik, juga akan
sulit dipahami oleh penggunanya, terutama kalangan perancang kebijakan dan praktisi
pembangunan pedesaan berkelanjutan. Menurut Vayda (1983) pengetahuan yang
dihasilkan dari kegiatan penelitian ekologi manusia perlu memperhatikan
penggunanya. Jika hanya bisa dipahami sendiri oleh penelitiannya, maka hal itu berarti
suatu kerugian bagi pengembangan masyarakat pedesaan. Penggunaan metoda
progresif, sesuai konteks masalah yang diamati dan dilakukan secara multi disiplin,
akan menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih menyeluruh (“holistik”) dan bisa
dipahami banyak bidang kerja, terutama para praktisi pembangunan.

Jika dikatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan ALK selalu
meninggalkan harmoni atau keseimbangan tidaklah sesuai dengan kenyataan.
Dalam tatanan global, dimana kekuatan industri dan ekonomi pasar sebagai penggerak
perubahan yang sangat besar, hubungan antara masyarakat dan lingkungannya
cenderung semakin mencerminkan ketidak harmonisan. Menurut Ward dan Dubos
(1980) kekuatan teknologi dan ekonomi bisa menjadi sumber ancaman ALK dan
kehidupan masyarakat pedesaan. Stark (1948) mengatakan bahwa secara konsepsional
hubungan antara masyarakat dan lingkungan, seperti juga halnya antara diri (self) dan
kesesuaian (universe), umumnya bersifat sangat antagonistik. Walau pun demikian,
beberapa ahli tetap merasa optimis jika elemen tata nilai (misalnya nilai kerakusan)
bisa dikendalikan dan empati (“moral”) kolektif secara lintas generasi bisa
ditumbuhkan dengan baik (Kleinman et al., 1995; Soedjatmoko, 1983; de Vries, 1986 dan Stark, 1948); maka ancaman kehancuran ekosistem bisa diantisipasi secara dini dan dukungan ALK terhadap kehidupan dalam jangka panjang bisa dipertahankan. Pengembangan tata nilai masyarakat merupakan bagian esensial dari pengelolaan ALK di pedesaan.

Pandangan bahwa hubungan interaksional antara ALK dan sistem masyarakat akan selalu menghasilkan keseimbangan hal itu dapat dinilai sebagai bentuk penyelesaian masalah yang berlebihan. Sejalan dengan semakin menipisnya kemampuan ALK untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat pedesaan, hal itu bukan saja mendatangkan masalah pada ALK (lahan kering) setempat (de Vries, 1982), seperti gejala munculnya padang pasir (desertification) karena ulah atau "buatan" manusia, melainkan juga mengunci kesehatan mental masyarakatnya (Soedjatmoko, 1983). Faktor pertambahan penduduk memanfaatkan faktor penting yang menyebabkan munculnya gejala penurunan daya dukung agroekosistem radi (Brown, 1986; Thijssse, 1982 dan Sudjamtoko, 1983), namun gaya hidup (life style) dan kemajuan aspek sosio-budaya masyarakat setempat juga sangat menentukan sampai seberapa jauh sistem pengelolaan ALK dinilai sehat.

4.3. Modal Sosial dan Pengelolaan ALK

Modal sosial merupakan kelanjutan dari nilai-nilai yang dibentuk oleh anggota masyarakat, dan dengan itu masyarakat bisa menggalang kerjasama berlandaskan rasa saling percaya, menghormati dan berbagi "hasil" (rugi dan untung, mudah dan senang, dan kemudahan dan kesulitan). Bisa dikatakan bahwa kemajuan masyarakat ditentukan oleh ukuran dan kualitas kerjasama yang berhasil dibangun oleh masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini modal sosial dianggap sebagai faktor yang menentukan kemajuan masyarakat pedesaan, termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan ALK. Mengambil pelajaran di negara luar, misalnya antara Korea Selatan dan Ghana (Huntington, 2000), dan di propinsi di Indonesia, misalnya antara di Bali dan Bengkulu (Saptana, dkk., 2003); nilai-nilai atau aspek sosio-budaya merupakan faktor penjelas yang kuat mengapa suatu masyarakat mempunyai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibanding masyarakat lainnya.

Dalam konsep pembangunan ekonomi pedesaan di masa lalu lebih banyak menekankan pada peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi ekonomi, yang hal
itu bukan saja menyebabkan semakin melebaranya kesenjangan sosial di pedesaan (Sajogyo, 1974; Tjonndronegoro, 1990), melainkan juga menjadikan kegiatan pengelolaan ALK di pedesaan secara ekologis tidak berkelanjutan. Jika dalam perancang kebijakan di pusat dan daerah secara sadar memasukkan faktor pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam perbaikan pengelolaan ALK, hal itu dapat diartikan sebagai langkah strategis dan komprehensif. Karena dengan begitu pengelolaan ALK bukan saja akan menciptakan ekosistem pedesaan yang lebih baik, melainkan juga akan menghasilkan kinerja perekonomian pedesaan yang lebih tangguh dan lebih berkeadilan. Pembangunan pedesaan berkelanjutan, dengan demikian, akan semakin mudah diwujudkan.

Gambar 5 menunjukkan hubungan antara aspek sosio-budaya dan pengelolaan ALK dalam kerangka pembangunan pedesaan secara berkelanjutan. Tampak bahwa pengelolaan ALK di pedesaan hanya menganalisis ketersediaan budaya material, seperti: pemanfaatan teknologi perangkat keras, kapital, input produksi fisik (misalnya: bibit baru, pupuk dan bahan kimia lainnya), prasarana ekonomi dan media komunikasi elektronik hal itu bisa memberikan harapan besar pada peningkatan produksi pertanian secara fisik dan ekonomi dalam jangka pendek. Namun apakah hal itu juga akan menjamin terwujudnya hak masyarakat untuk memperoleh kecukupan kebutuhan dasar (basic need), kesempatan kerja dan usaha yang lebih baik, menikmati kenyamanan lingkungan hidup yang meningkat, jaminan masyarakat setempat ikut dalam proses pengambilan keputusan politik dan kualitas daya dukung agroekosistem yang relatif tetap bagi generasi berikut (Inayatullah, 1979; Pranadj, 2003c); hal itu masih menimbulkan tanda tanya besar.

(1) Pembangunan masyarakat pedesaan berkelanjutan erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat setempat, dan hal itu bisa ditempuh secara efektif melalui transformasi atau penguatan modal sosial setempat. Pengelolaan ALK yang sehat, dengan demikian, adalah refleksi dari semakin kuatnya peran modal sosial setempat. Komponen modal sosial yang dinilai penting untuk menggerakkan pembangunan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan adalah kualitas SDM yang memadai, struktur dan organisasi sosial setempat (Grootaert, 1998; Oyen, 2000; dan Fournier, 2000) yang sehat, tata nilai (Grootaert and Bastelaer, 2002; Harrison and Huntington, 2000; Prakash, 2000; Innerarity, 2000; Pranadj, 2002) yang mencerminkan kemajuan, kepemimpinan yang progresif terhadap kemajuan dan sistem (politik dan)
penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dan otonom (Tjondronegoro, 1977; Woolcock, 2000; Burns, 1979; Alfian, 1986; dan Pranadj, 2003b).

4.3.1. Kompetensi SDM

Kompetensi atau kualitas SDM yang dinilai penting untuk mendukung pengelolaan ALK di pedesaan mencakup antara lain: pertama, tingkat pengetahuan dan ketrampilan individu masyarakat pedesaan untuk melakukan kegiatan pertanian yang tidak merusak lingkungan sumberdaya alamnya, khususnya ALK. Akan lebih baik lagi jika kompetensi tersebut terarah pada pengembangan kegiatan ekonomi berbasis non-lahan. Kedua, tingkat kemampuan emosional dikaikan untuk menjalin hubungan kerjasama yang terorganisir dengan individu lain dalam mengelola sumberdaya alam di pedesaan. Ketiga, kemampuan empati dan melakukan kerjasama untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola kegiatan ekonomi yang terkait dengan sumberdaya alam dan pemeliharaan ALK setempat. Keempat, kemampuan mengapresiasi tata nilai untuk mendorong kemajuan kehidupan yang berbasis pada penyehatan ALK setempat. Kelima, mempunyai pengetahuan yang memadai untuk mengapresiasi pentingnya penerapan sistem pengelolaan ALK yang dilandaskan pada ilmu pengetahuan.

4.3.2. Struktur dan Organisasi Masyarakat

Komponen struktur dan organisasi sosial yang sehat dalam mendukung pengelolaan ALK setempat antara lain dicirikan oleh adanya: pertama, interdependensi antar anggota masyarakat pedesaan yang relatif simetris. Dengan adanya interdependensi yang relatif simetris peluang terjadinya eksploitasi antar anggota masyarakat pedesaan, terutama melalui kegiatan ekonomi dan curahan tenaga kerja, menjadi bisa ditekan secepat mungkin. Kedua, adanya diferensiasi sosial yang didasarkan pada peranan atau fungsi yang jelas dalam pengelolaan ALK setempat. Ketiga, tumbuhnya kesadaran kolektif untuk membangun jaringan kerjasama yang didasarkan atas rasa saling menghormati (mutual respect) dan hubungan saling percaya (mutual trust). Dengan beberapa elemen “modal sosial” ini pengelolaan ALK setempat bisa diarahkan untuk memenuhi kesejahteraan bersama dan sekaligus menjaga kualitas ALK yang ada.
Dalam keorganisasian sosial yang dimaksud, di dalamnya tercakup sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan ALK setempat. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan (manajemen sosial), tadi adalah adanya penerapan asas akuntabilitas, transparansi yang melatar belakangi keputusan yang diambil, prinsip demokrasi, cara berpikir yang rasional dan kemudahan untuk dilakukan pengevaluasi separa terbuka terhadap setiap keputusan yang telah diambil bersama. Sistem manajemen demikian tadi dinilai sesuai untuk pengelolaan ALK setempat dalam rangka mendukung pembangunan pedesaan secara berkelanjutan.

4.3.3. Tata Nilai

Di muka telah dijelaskan tentang pentingnya faktor tata nilai dalam pembentukan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Keberhasilan pengelolaan ALK juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan tata nilai yang mengisi kelembagaan kerjasama masyarakat pedesaan setempat. Tata nilai yang baik akan menghasilkan cara terbaik untuk memecahkan masalah dalam situasi yang khusus untuk mencapai tujuan ideal yang telah ditentukan (Merton, 1962). Hubungan antara tata nilai, cara atau peran dan tujuan dapat digambarkan seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Tata nilai bukan hanya menghasilkan rumusan tujuan ideal, namun untuk merumuskan juga jalan atau cara yang sesuai untuk mencapai tujuan ideal yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan ALK, sebagai bagian dari pembangunan masyarakat pedesaan, seharusnya didasarkan pula pada tata nilai yang sesuai. Tata nilai yang mampu mengarahkan masyarakat pedesaan mencapai kemajuan dianggap sebagai nilai dasar yang perlu dikembangkan. Nilai dasar yang dinilai sesuai untuk itu antara lain: *pertama, rajin dan kerja keras*, sebagaimana (misalnya) dicontoahkan pada masyarakat Jepang. Lawan dari tata nilai ini adalah malas dan kerja seadanya (“loyo”).

*Kedua*, adanya keinginan yang kuat menjalankan pola hidup hemat untuk tujuan produktif. Lawan dari tata nilai ini adalah pola hidup boros dan konsumtif, hal ini berpotensi mengurangi kekayaan alam dan ALK setempat. *Ketiga*, menjunjung tinggi budaya malu dan menghargai prestasi, yang dengan tata nilai ini pengrusakan dan pengurangan ALK setempat bisa dihindarkan. Lawan dari tata nilai ini adalah penghargaan terhadap prodiumisme yang bersifat skriftip dan kurangnya rasa malu (“rai gedheg”) jika seseorang tidak bisa menunjukkan prestasi atau hasil yang positif dalam pengelolaan ALK setempat. *Keempat*, adanya kerendahan hati (tidak sombong), sabar dan daya empati yang tinggi terhadap anggota masyarakat lain, yang dengan ini memperkecil peluang adanya pengurusan ALK yang berimplikasi menyusahkan orang (“masyarakat”) lain atau generasi berikut. *Kelima*, adanya penghargaan terhadap cara berpikir rasional, sistematik dan visi jangka panjang, serta menyukai hal-hal yang bersifat inovatif untuk pengelolaan ALK setempat.

4.3.4. Kepemimpinan

Bagi masyarakat berbudaya paternalistik, faktor kepemimpinan sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan. Poensioen (1969) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu penggerak penting perubahan (“pembangunan”) masyarakat. Peran pemimpin dalam masyarakat pedesaan di Jawa sangat menentukan. Hal ini sudah barang tentu akan berpengaruh besar pula terhadap pengelolaan ALK di pedesaan. Pengertian pemimpin harus dibedakan dengan manajer. Menurut Jolliff (1993), mengutip pendapat Warrant Bennis (mantan President of the University of Cincinnati), mengemukakan bahwa “Leaders are people who do the right thing; managers are people who do things right. Both are crucial, but they differ profoundly”. Beberapa ciri kepemimpinan yang dinilai penting dalam pengelolaan ALK adalah, *pertama*, seorang pemimpin haruslah memiliki visi ke depan yang jelas tentang bagaimana mengelola ALK setempat untuk menopang peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat. Kejelasan visi tadi seyogyanya bisa dimengerti dengan mudah oleh anggota masyarakat pedesaan yang mengikuti kepemimpinannya.

Kedua, dalam keadaan kehidupan masyarakat dan ALK yang mengalami kerusakan hingga pada ambang kritis biasanya diharapkan kehadiran seorang pemimpin yang berciri Messiah ("Ratu Adil") yang mampu menggerakkan masyarakat keluar dari krisis. Oleh sebab itu, seorang pemimpin sebaiknya mempunyai kemampuan menggerakkan dan mengarahkan anggotanya untuk bukan saja membangun kesadaran tentang pentingnya mengelola ALK setempat secara baik, namun lainnya juga menggerakkan masyarakat setempat untuk mengelola ALK agar tetap memiliki daya dukung yang memadai hingga berlanjut pada kehidupan generasi berikutnya. Pengertian pemimpin sebagai panutan di sini lebih diartikan sebagai inspirator dalam upaya mengelola ALK setempat secara lebih baik.


Keempat, seorang pemimpin selain mampu menjadi panutan, juga harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Untuk meng-inspire pengikutnya seorang pemimpin tidak cukup menunjukkan dalam bahasa tindakan, namun tidak kalah pentingnya mengkomunikasikan keinginannya secara rasional dan emosional. Gagasan yang baik seorang pemimpin tidak cukup dimengerti kalangan tertentu, namun harus bisa diterjemahkan dalam ragam bahasa (termasuk bahasa yang sederhana untuk kalangan awam atau petani). Kemampuan berkomunikasi juga sangat penting (Berlo, 1960) terutama untuk mempersuasikan sesuatu pada pengikutnya. Kepandaian
berkomunikasi tidak hanya berlaku untuk hubungan interaktif yang bersifat horizontal, \( \ldots \) melainkan juga yang bersifat vertikal.

**Kelima**, dalam aspek kepemimpinan juga perlu terkandung kekuatan untuk digunakan sebagai alat menyelesaikan konflik internal yang terjadi di masyarakat setempat. Terjadinya konflik biasanya dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan yang sulit dipertemukan. Kepemimpinan seseorang akan memperoleh pengakuan ketika terjadi bisa menyelesaikan konflik yang terjadi berdasar prinsip saling menguntungkan (“win-win solution”). Dalam arti demikian, kepemimpinan tadi memiliki kekuatan sebagai *conflict resolution* atau *solidarity maker* yang efektif. Untuk menjadi *solidarity maker*, seorang pemimpin bukan hanya perlu mempunyai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, namun juga piawai dalam berkomunikasi (ciri *keempat*).

### 3.5. Desentralisasi, Otonomi dan Kepercayaan


Melalui jalan desentralisasi seharusnya kreativitas lokal atau *indigenous knowledge* akan tersalur lebih efektif untuk mendorong dan meningkatkan pengelolaan ALK di pedesaan. Walaupun saat ini kebijakan desentralisasi atau otonomi baru dipandang baru sebagai modal politik, namun semangat kebijakan ini bisa memberikan inspirasi masyarakat pedesaan untuk melakukan penilaian kritis terhadap menyelenggarakan pemerintahan setempat, terutama yang terkait dengan kebijakan

Dilihat dari kedaulatan masyarakat pedesaan, kebijakan otonomi yang ada sekarang ini masing menyisakan garis pemisahan antara desa dan atas desa, khususnya dengan kabupaten dan kota. Perdebatan bahwa kedaulatan rakyat bisa diwakilkan, dibagi, atau didelagisikan hingga kini terus berlangsung di kalangan pakar politik dan elit partai. Apakah partai politik selama ini telah mewakili kedaulatan masyarakat pedesaan seharusnya tetap menjadi pertanyaan besar. Mengikuti pemikiran Friedrich (1950), jika demokrasi bisa menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat tingkat bawah ("local"), hal itu baru baru bisa dijadikan bukti bahwa kadaulatan rakyat atau demokrasi telah berjalan dengan baik.

Jika kedaulatan rakyat ini tidak menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di tingkat kabupaten hingga desa, hal ini menunjukkan bahwa moralitas atau nilai-nilai yang dianut dan dijalankan oleh kaum elit kabupaten dan kota masih memiliki kesejajaran yang tajam dengan semangat demokrasi yang dilandaskan pada kedaulatan masyarakat pedesaan. Implikasi lebih lanjut adalah bahwa kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap kalangan elit pemerintahan dan politik ini belum terangkat secara berarti. Dalam kondisi demikian pemberdayaan melalui partisipasi menyeluruh (deep participation, Malvinice and Sweetser, 2003) masyarakat pedesaan sulit menjadi kenyataan, karena pembagian kekuatan untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan pada petani atau masyarakat bawah masih sangat kecil dan nyaris tidak ada.

Desentralisasi yang ada sekarang ini masih membuka kekhawatiran, terutama terbukanya celah anomali atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di tingkat elit daerah tingkat II (kabupaten dan kota). Peringatan Varma (1975) tentang kemunduran ilmu politik (pemerintahan) dalam “pengendalian” masyarakat perlu memperoleh perhatian serius terutama disebabkan oleh tercabutnya instrumen nilai moral dan etika dalam keilmuan politik. Sangat mungkin terjadi sisi negatif kebijakan ini akan muncul ketika para elit pemerintahan daerah tingkat II (kabupaten dan kota) masih akan berlaku sewenang-wenang terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat (Hidayat, 2000). Pemakauna yang salah terhadap otonomi (antara lain)


4.4. Hipotesa Penelitian

Hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian tidak dimaksudkan untuk diuji secara (testable) “ya” dan “tidak”. Lebih tepat jika hipotesa ini dijadikan semacam pengarah (“guidance”) atau peta penganalisaan. Sejalan dengan pertanyaan penelitian, proposisi (atau pernyataan umum yang akan dinilai kebenarannya dalam) penelitian adalah: “model pengelolaan ALK di pedesaan yang bisa diandalkan adalah yang di dalamnya mengandung aspek penguatan modal sosial setempat”. Ada 3 (tiga) hipotesa utama yang bisa diturunkan dari proposisi penelitian tersebut, yaitu:
1) Jika sistem atau model pengelolaan ALK yang diperkenalkan pemerintah tidak bisa diserap dan menjadi bagian dari penguatan modal sosial masyarakat pedesaan setempat, maka sulit diharapkan kegiatan pengelolaan ALK (yang dianggap sudah baik) akan menjadi bagian dari pembangunan masyarakat pedesaan berkelanjutan.

2) Jika model pengelolaan ALK tadi tidak memasukkan penguatan modal sosial setempat sebagai komponen utamanya, maka kegiatan pengelolaan ALK di pedesaan diperkirakan akan mengalami banyak hambatan; selain itu perkembangan pedesaan setempat juga akan menghadapi ancaman kemacetan dan ketidak-efisienan yang serius.

3) Jika percepatan transformasi sosio-budaya masyarakat setempat (ke arah yang lebih maju) tidak dijadikan sebagai komponen strategis upaya peningkatan kualitas pengelolaan ALK, maka kegiatan pengelolaan ALK setempat akan kurang memperoleh daya dorong yang memadai dan proses pengurusan dan pengrusakan ALK atau sumberdaya alam pertanian setempat akan semakin sulit dibendung.

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan pengujian terhadap beberapa hipotesa pendukung yang lebih spesifik. Beberapa hipotesa yang lebih spesifik tadi adalah:

1) Jika penyelenggaraan proyek pengembangan pengelolaan ALK lebih mengutamakan pemberian bantuan secara fisik dari pada pengembangan kompetensi SDM masyarakat pedesaan setempat, maka hal itu disamping akan menjadikan masyarakat pedesaan semakin sulit untuk mandiri juga semakin menyulitkan masyarakat pedesaan tadi untuk mengembangkan kompetensi atau daya saing SDM-nya. Pada gilirannya pengelolaan ALK di pedesaan secara hampir pasti akan mengalami kemunduran karena tidak dikendalikan oleh tangan-tangan trampil SDM setempat dan SDM yang memiliki kepedulian terhadap kerusakan ALK atau sumberdaya alam setempat.

2) Jika penyelenggaraan proyek pengembangan pengelolaan ALK terlalu mengandalkan instruksi aparat pemerintah di atas desa dan kurang memberikan peluang bagi pengembangan dukungan kepemimpinan lokal, maka partisipasi mendalam (deep participation) masyarakat pedesaan setempat dalam
pengelolaan ALK di pedesaan akan sulit dibangun, dan lebih-lebih lagi untuk
ditingkatkan.

(3) Jika sistem atau model pengembangan pengelolaan ALK lebih memperhatikan
ekmauan dari pemimpin formal atas desa, maka kegiatan pengelolaan ALK
akan mengalami penurunan kualitas yang relatif ekstrim sejalan dengan
semaikn lamanya proyek pengembangan pertanian lahan kering selesai
dijalankan.

(4) Jika struktur masyarakat pedesaan bersifat timpang dan tidak berkaitan dengan
pembagian peran yang fungsional diperkirakan hal itu akan berpengaruh
negatif terhadap pengelolaan ALK setempat. Hal ini akan lebih parah lagi
manakala diferensiasi masyarakat yang lebih banyak didasarkan atas unsur
yang tidak produktif (askriftif).

(5) Jika sistem organisasi dan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan tidak
dikembangkan secara serius dan dijadikan wahana pengelolaan kegiatan
ekonomi yang berbasis ALK dan kompetensi SDM setempat, maka selain
terdajinya kerusakan ALK dan lingkungan alam di pedesaan akan semakin sulit
dibendung, juga akan menyulitkan terwujudnya keadilan sosial dan
perkembangan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

(6) Dengan masih berkembangnya praktek sentralisme dan monolitik dalam
kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian dalam pengelolaan
ALK yang dilakukan pemerintah, maka disamping hal itu tidakefisien juga
akan menghambat perkembangan tata nilai setempat dan merusak potensi tata
nilai maju yang ada pada masyarakat pedesaan setempat.

4.5. Tabel Pengujian Hipotesis Penelitian

Untuk menyampaikan hasil pengujian hipotesa penelitian dilakukan secara
kuantitatif dan kualitatif. Pengujian hipotesa secara kuantitatif sebisa mungkin
ditampilkan dalam bentuk table silang dua arah (two-ways table). Untuk pengujian
hipotesa secara kualitatif akan dijelaskan secara deskriptif, dan jika mungkin dengan
ilustrasi gambar atau flow-chart. Dengan cara pengkatagorian atas variable tertentu,
misalnya hubungan antara derajat interdependensi keorganisasian ekonomi petani dan
kemampuan petani mengelola ALK, kemungkinan besar hal itu bisa ditabulasikan.
Tabel 5 adalah kerangka tabel boneka (dummy table) untuk penganalisaan dan pengujian hipotesis penelitian. Desa Gunungsari dan Gondanglegi adalah desa contoh 2PLK di Boyolali, yang masing-masing mewakili gugus desa yang pernah mendapat perlakuan khusus melalui proyek dan desa dampak yang tidak mendapat perlakuan khusus. Desa Kedungpoh dan Katongan adalah desa contoh PBD di Gunungkidul, yang masing-masing mewakili gugus desa yang terkena proyek dan tidak terkena proyek. Dengan tabel ini dapat diperbandingkan besaran variabel menurut lokasi desa dalam satu gugus keproyekan pengelolaan ALK yang sama, yaitu antara Desa Gunungsari dan Gondanglegi atau antara Desa Kedungpoh dan Katongan. Dari Tabel 5 ini juga dapat dilakukan perbandingan besarnya nilai variabel antar desa contoh berdasar gugus keproyekan yang berbeda, yaitu antara Desa Gunungsari (2PLK) dan Desa Kedungpoh (PBD).

Tabel 7 memuat gambaran yang lebih rinci tentang hubungan aspek yang dianalisis dengan tujuan pembangunan pedesaan berkelanjutan, yang selanjutnya bisa digunakan sebagai hipotesis kerja penelitian. Sebagai gambaran, secara umum dapat dikemukakan bahwa keragaman umum wilayah mempunyai pengaruh besar dengan pembangunan pedesaan berkelanjutan. Aspek keragaman umum wilayah penelitian atau kumpulan variable pertama masih terlalu umum, dan di dalamnya berisi beberapa komponen yang setiap komponennya bisa memberikan pengaruh berbeda terhadap pembangunan pedesaan berkelanjutan. Jika tidak dilihat secara rinci, maka komponen mana yang memiliki pengaruh positif (+) atau negatif (-) terhadap pembangunan pedesaan berkelanjutan tidak dapat diidentifikasi. Dengan tidak dapat diidentifikasi secara rinci, maka akan sulit dijelaskan dan diinterpetasi lebih lanjut apa yang sebaiknya dilakukan agar pembangunan pedesaan berkelanjutan bisa berjalan dan menjejahanakan masyarakat setempat.

Selain aspek keragaman umum wilayah, dari Tabel 7 juga tampak bahwa setiap aspek yang dianalisis merupakan kumpulan dari beberapa komponen atau variabel penjelas pembangunan pedesaan berkelanjutan. Sebagai contoh, kumpulan variable kedua adalah karakteristik petani responden, yang di dalamnya memuat komponen umur dan lama menjadi petani, ukuran KK, tingkat pendidikan formal, pengetahuan pertanian, keterlibatan petani dalam organisasi desa, dan keterlibatan petani dalam program atau proyek pengelolaan ALK. Seperti juga halnya pada kumpulan variabel pertama, dari setiap variabel penjelas (dalam kumpulan variabel kedua) dapat
Tabel 5. Kerangka Tabel Boneka (dummy table) untuk Analisis dan Pengujian Hipotesis Penelitian

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Aspek yang dianalisis</th>
<th>Besaran (angka) menurut Desa Contoh</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gunung-sari</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Keragaan umum wilayah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Tata letak dan geografi daerah penelitian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Ilmu &amp; topografi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pertanahan &amp; pertanian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Prasarana wilayah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Penduduk &amp; mata pencarian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Karakteristik RT petani</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Umur, ukuran KK &amp; lama sebagai petani</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pendidikan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemilikan aset</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Keanggotaan dalam kip/organisasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Keterlibatan dalam program/proyek</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Persepsi petani</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan sumberdaya alam</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan usaha pertanian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemilahan terhadap jenis pekerjaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan ekonomi rumah tanggal petani</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Migrasi TK keluarga</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pengelolaan ALK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemanfaatan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemeliharaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Advokasi/penyadaran masyarakat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Aspek Modal Sosial</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kompetensi SDM</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Tata nilai lokal</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Kepemimpinan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Organisasi ekonomi &amp; tenaga kerja</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Manajemen kemanusiaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Hukum dan pemerintahan</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Tabel 6. Kerangka Hubungan antara Aspek yang Dianalisis dan Tujuan Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Aspek yang Dianalisis</th>
<th>Komponen Tujuan Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Produkt</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Keragaan Umum Wilayah Penelitian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lokasi &amp; Letak Geografis</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Iklim &amp; Topografi</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Status dan Tata Guna Tanah</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pola Pertanian</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prasarana Wilayah</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Penduduk dan Pendidikan</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mata Pencaharian</td>
<td>+</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Keterangan:
(3) Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Teknis; (4) Pendapatan dan Efisiensi Ekonomi; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar; (6) Pemerataan Kesempatan Bekerja dan Berusaha; (7) Partisipasi Sosial; (8) Mobilitas Sosial Vertikal; dan (9) Daya Dukung ALK dan Lingkungan Pedesaan.

### Hipotesa Kerja:
- hubungan positif lemah: $\text{+++}$
- hubungan positif sedang dan $\text{++++}$ hubungan positif kuat
- hubungan negatif lemah: $\text{---}$
- hubungan negatif sedang dan $\text{------}$ hubungan negatif kuat
- tidak ada hubungan khusus
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Aspek yang Dianalisis</th>
<th>Produkt</th>
<th>Pendptn</th>
<th>BasicNeed</th>
<th>Pemrtaan</th>
<th>Partisipasi</th>
<th>Mobvert</th>
<th>Dydkung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>Persepsi Masyarakat Petani</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan Sumberdaya Alam</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan Usaha Pertanian</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+/-</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Penilaian terhadap Jenis Pekerjaan</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan Ekonomi R.T. Petani</td>
<td>+</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+/-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Migrasi Tenaga Kerja Keluarga</td>
<td>+/-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pengelolaan ALK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemanfaatan ALK melalui Usaha</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pertanian: Teknologi dan Pola</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Eksplotasinya</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Pemeliharaan ALK</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Perbaikan ALK</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Advokasi/Penyadaran Masyarakat</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>++</td>
<td>+/-</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dalam Pengelolaan ALK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Aspek yang dianalisis</td>
<td>Produkt</td>
<td>Pendptn</td>
<td>BasicNeed</td>
<td>Pemtraan</td>
<td>Partisipasi</td>
<td>Mobvert</td>
<td>Dydkung</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Peranan Faktor Sosio-budaya dalam Pengelolaan ALK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kompetensi SDM</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tata Nilai Lokal</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kepemimpinan</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Keorganisasi Ekonomi dan Tenaga Kerja</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Manajemen Sosial</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hukum dan Pemerintahan</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Caritas (&quot;Belas Kasihan&quot;)</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+/-</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengembangan Basis Produksi bahan Subsisten</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+/-</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengembangan Organisasasi Ekonomi</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengembangan Berbasis ALK dan Lingkungan Hidup</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemberdayaan Sosio-budaya melalui Penguatan Modal Sosial</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
<td>+++</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Kaitan kumpulan variabel *kelima* dengan pembangunan pedesaan berkelanjutan akan difokuskan pada bagaimana "bermainnya" masing-masing variabel ini dalam pengelolaan ALK di pedesaan. Sebagai contoh, jika keorganisasi ekonomi dan ketenaga-kerjaan di pedesaan mencerminkan pola yang mengarah pada interdependensi yang simetris, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan ALK di pedesaan akan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Demikian juga halnya pada penganalisaan terhadap komponen tata nilai lokal. Jika komponen tata nilai lokal yang ada di pedesaan telah mengarah pada ciri tata nilai masyarakat maju, maka pengelolaan ALK akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Penganalisaan dengan menggunakan kumpulan variabel *kelima* mendapat tekanan lebih besar dibanding kumpulan variabel sebelumnya. Semua variabel adalah komponen yang membentuk modal sosial (social capital) dan masyarakat madani (civil society). Tekanan penelitian ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya modal sosial dalam pengelolaan ALK di pedesaan. Jika modal sosial setempat bisa dibangkitkan atau diberdayakan maka masa depan pengelolaan ALK di pedesaan akan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dari analisis ini diharapkan dapat ditarik pelajaran tentang pentingnya menempatkan penguatan modal sosial setempat dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pembangunan berkelanjutan dalam tingkat negara bangsa (nation state) seharusnya diawali dari dan dilandaskan pada perseleksiananya pembangunan berkelanjutan di pedesaan.